
PEMETAAN PERKEMBANGAN EKONOMI ANTAR DAERAH DI INDONESIA

Fahrudin Ramly dan Ali TutupohoFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia**ABSTRACT**

Equitable distribution of development results in various regions has become a new paradigm in current national development policies. However, in reality, inequalities in development between regions, both between provinces and regions, are still encountered. This study aims to map the economic development between regions in Indonesia. Referring to the amount of GRDP in each province and region, there is a huge difference. Provinces which are located in Java Island, have a large GRDP contribution to GDP. This means that the Indonesian economy is still concentrated in these areas.

Keywords : *Economic Mapping, GRDP, Tabulation***JEL Classification :** *P51, F43, C38***PENDAHULUAN**

Pengalaman pembangunan ekonomi di Indonesia sejak awal kemerdekaan memiliki perkembangan yang kurang mengembirakan. Kondisi politik yang tidak stabil dan kabinet yang selalu silih berganti sehingga berakibat pada kebijakan ekonomi yang selalu berubah sepanjang waktu. Pada awal kemerdekaan perhatian terhadap pembangunan politik lebih diutamakan daripada pembangunan ekonomi. Tercatat selama periode 1960–1965, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 1,9 persen (Dumairy, 1996).

Sejak Orde baru mulai berkuasa gagasan tentang pembangunan ekonomi mulai mendapat perhatian yang serius dalam memulihkan roda perekonomian dan memperoleh hasil secara nyata. Telah dilaksanakan serangkaian konsep dan program ekonomi dengan sistematika yang jelas dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Terjadi peristiwa-peristiwa penting bagi perekonomian Indonesia. Perekonomian tumbuh lebih cepat dan mantap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Walaupun pada awalnya masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi seperti, ketidak stabilan politik, orientasi dan prioritas dalam kebijakan pemerintah yang terlalu mengejar sasaran-sasaran politik dan idil, hubungan dengan luar negeri khususnya negara Barat yang tidak terlalu baik dan kecenderungan ideologis pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi dengan campur tangan langsung yang luas sekali (Yustika, 2007). Dengan perhatian yang serius terhadap bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak periode ini,

banyak kalangan menilai pemerintah berhasil meningkatkan output nasional (Both dan Mc Cawley, 1982). Namun dengan adanya krisis ekonomi tahun 1998 membuat pertumbuhan ekonomi menjadi minus 13,1 persen hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jauh lebih buruk daripada kemerosotan ekonomi pada pertengahan tahun 1960-an. Di tengah gejolak ekonomi dan politik itulah menggema kata reformasi dalam artian mencari jalan keluar dari krisis yang dihadapi. Menurut Basri (2002) kata reformasi pada waktu itu mengandung dua unsur yaitu: Pertama, perubahan ke arah yang lebih baik: karena terjadi penyimpangan-penyimpangan dari pola normal atau nilai-nilai universal atau hukum alam sebagaimana tercermin pada berbagai anomali yang menjamur di dalam hampir segala aspek kehidupan. Kedua, pembaruan: karena sistem yang ada tidak mampu lagi merespon persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat perubahan internal dan eksternal.

Dengan berbagai kebijakan, maka Indonesia dapat keluar dari krisis dan kembali lagi kepada kebangkitan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomisudah mencapai rata-rata 5% per tahun yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak lagi termasuk dalam kategori negara dengan pendapatan per kapita "rendah".

Walaupun demikian, banyak kalangan menilai, hasil pembangunan selama ini belum merata dilihat dari berbagai aspek. Ketidak merataan dapat dipandang dari sudut antar propinsi atau kawasan, antar daerah pedesaan dan kota serta antara golongan masyarakat. Atau dapat juga diklasifikasi berdasarkan dimensi modernitas, regional dan etnis. (Kuncoro, 2000). Pengalaman pembangunan

selama ini masih terpusat pada kawasan Indonesia Barat khususnya di Pulau Jawa. Kemajuan pembangunan fisik khususnya infrastruktur membuat daerah di Pulau Jawa semakin berkembang dibandingkan dengan daerah lainnya. Penekanan pada sektor modern yang umumnya berada di perkotaan, sedangkan sektor tradisional yang berada di pedesaan menjadi tertinggal.

Ketimpangan pembangunan merupakan fenomena global yang terjadi hampir di setiap negara. Kenyataan ini dapat menegaskan bahwa proses pembangunan dapat memiliki *trade off* antara keharusan mengejar pertumbuhan ekonomi dengan upaya pemerataan. Pemerintah sering mengalami dilematis antara *imperative* pertumbuhan ekonomi dan kewajiban moral menciptakan keadilan sosial. Masalah ketimpangan menjadi rumit karena sering dikaitkan dengan kemiskinan ataupun keterbelakangan. Hasil dari beberapa penelitian masih memberikan kesimpulan yang berbeda. Terdapat sejumlah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kemiskinan dan ketimpangan meningkat, kemiskinan menurun tetapi ketimpangan meningkat dan kemiskinan bertambah tetapi ketimpangan menurun. Serta kemiskinan dan ketimpangan keduanya menurun, Kuncoro (2000). Oleh karena itu tidak salah bila disimpulkan bahwa kendati pertumbuhan ekonomi yang cepat umumnya menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak menjamin adanya penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

LANDASAN TEORITIS

Pembangunan ekonomi sering dipakai secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Soelistyo (2003) pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah proses perubahan ekonomi yang terjadi pada negara maju. Pertumbuhan ekonomi biasa digunakan untuk menggambarkan terjadinya peningkatan output (GDP) secara berkesinambungan suatu daerah atau negara. Sedangkan pembangunan ekonomi (*economic development*) adalah proses perubahan ekonomi pada negara yang sedang berkembang.

Menurut Boediono (1982) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Penekanannya pada tiga aspek yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Sebagai suatu proses, maka gambaran ekonomi bukan hanya terjadi pada suatu saat, tapi interkasi berbagai aspek dinamis dari suatu perekonomian, dengan melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke

waktu. Aspek output per kapita harus dilihat dari sisi output total dibagi dengan jumlah penduduk. Sedangkan aspek perspektif waktu jangka panjang melihat pertumbuhan ekonomi dalam kecenderungannya untuk jangka waktu yang sangat panjang.

Kemudian Kuznets dalam Jhingan (1994) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan.

Untuk mengetahui terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian yaitu dengan membandingkan GNP pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Dapat ditulis:

$$\text{Pertumbuhan ekonomi (G)} = \frac{GNP_t - GNP_{t-1}}{GNP_{t-1}} \times 100\%$$

Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, terkait erat dengan pembangunan politik dan sosial sehingga ukurannya tidak hanya terbatas pada pendapatan nasional/daerah atau pendapatan per kapita. Karena pembangunan politik dan sosial mempunyai indikator yang kualitatif, maka pembangunan ekonomi yang dimaksud di sini adalah proses perubahan ekonomi yang sifatnya kuantitatif dengan menunjuk pada perubahan PDRB.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain: *Pertama*, Sumber daya manusia (*Human Resource*) yang tidak hanya menyangkut kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya. Sumber daya manusia atau penduduk dapat mempunyai peran ganda. Disatu sisi berperan sebagai produsen yang bertindak sebagai pihak yang melakukan kegiatan produksi atau bertindak sebagai tenaga kerja. Di sisi yang lain penduduk juga berperan sebagai konsumen di mana hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah penduduk yang besar menjadi pasar yang potensial bagi barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga pertemuan kekuatan *supply* dan *demand* terhadap barang dan jasa akan menghasilkan proses terjadinya peningkatan output secara berkesinambungan. Akan tetapi jumlah yang besar yang tidak diikuti dengan kualitas yang memadai tidak akan mampu menghasilkan output yang optimal. Demikian pula halnya jika tidak disertai dengan daya beli yang cukup, tidak akan menjadi kekuatan permintaan yang nil, sehingga jumlah yang besar bukan

hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi akan tetapi justru menjadi beban pembangunan.

Kedua, Sumber daya alam (*Natural Resources*). Negara atau daerah yang dikaruniai sumber daya alam memiliki keunggulan awal karena faktor *endowment* dibandingkan dengan negara atau daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Peranan sumber daya alam dalam proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kontribusi yang penting. Dornbusch dkk (2004) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat dialami oleh Amerika Serikat sekitar tahun 1802 dan 1870 adalah karena ketersediaan sumber daya alam dalam hal ini adalah karena berlimpahnya tanah-tanah subur. Demikian pula dengan peningkatan tajam PDB Norwegia antara tahun 1970 sampai 1990 juga karena adanya penemuan dan perkembangan cadangan minyak mentah. Karena itu, faktor sumber daya alam menjadi faktor produksi penting dan terpisah dari faktor produksi lainnya, khususnya modal. Hal ini juga disebabkan oleh barang sumber daya merupakan bahan baku bagi kegiatan proses produksi selanjutnya dalam menghasilkan barang dan jasa lainnya. (Tietenberg, T, 1988).

Walaupun demikian pemilikan sumber daya alam yang melimpah bukanlah syarat mutlak untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini hanya bisa terjadi apabila negara tersebut memiliki faktor produksi komplementer seperti sumber daya manusia, modal dan teknologi untuk dapat mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki.

Ketiga, Sumber daya modal dalam bentuk *tangible capital* berupa pabrik, peralatan dan sebagainya atau *social overhead capital* yang merupakan hasil investasi sektor publik. Ketersediaan modal tersebut sangat diperlukan dalam proses produksi. Peranan modal atau tepatnya investasi dalam pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh Harrod Domar dengan melihat adanya efek ganda yaitu disatu sisi sebagai permintaan output yang berupa barang modal, sedangkan di sisi yang lain sebagai penyedia tambahan barang modal yang akan meningkatkan kapasitas produksi. Jadi investasi mempunyai efek terhadap permintaan (AD) dan efek terhadap kapasitas produksi (AS). Atau dapat ditulis $I = \Delta K$. Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan stok modal (K) menambah kemampuan industri untuk menghasilkan output potensial (Q_p) yaitu output yang dapat dihasilkan sesuai dengan besar kecilnya kapasitas industri. Output potensial (Q_p) berbeda beda dengan output yang benar-benar diproduksi atau direalisasi (Q_r) yang tergantung pada besar kecilnya permintaan agregat (AD). Semakin kecil permintaan agregat semakin kecil output ril relatif

terhadap Q_p yang berarti semakin besar kapasitas produksi yang menganggur (*excess capacity*) dan sebaliknya.

Harrod Domar menggambarkan hubungan antara stok modal dengan output potensial sebagai berikut: $Q_p = hK$, di mana h merupakan banyaknya unit output yang bisa dihasilkan dari setiap kapital. Teori Harrod Domar mengatakan bahwa hubungan antara K dan Q_p adalah proporsional. Jadi apabila terdapat sejumlah I tertentu yang akan meningkatkan K , otomatis Q_p juga akan meningkat secara proporsional. Hubungan tersebut dapat dirumuskan:

$$\Delta Q_p = h \Delta K = hI.$$

Keempat Teknologi. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa berlangsung dalam jangka panjang tanpa menggunakan teknologi yang semakin maju. Melalui teknologi proses produksi dapat ditingkatkan efektifitas dan efisiensinya. Teknologi yang semakin maju dapat diterapkan pada penggunaan sumber daya alam yang sudah ada agar penggunaannya semakin efisien atau untuk memperoleh sumber daya alam yang baru.

Keempat faktor tersebut menjadi pilar utama bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi. Agar pilar tersebut bisa berfungsi dengan baik, maka diperlukan dukungan faktor yang sifatnya non ekonomi (sosial, politik ataupun budaya) seperti yang dikatakan oleh Nurkse bahwa pembangunan ekonomi berkaitan dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik dan latar belakang historis. Demikian pula dengan Kaldor dengan mengatakan bahwa pengkajian terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi, diluar analisis faktor ekonomi membawa kepada pengkajian terhadap unsur-unsur penentu yang bersifat psikologis dan sosiologis.

Perbedaan potensi yang dimiliki diantara berbagai daerah dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pertumbuhan. Demikian pula jika kebijakan pemerintah mengikuti strategi yang berorientasi kepada pertumbuhan, cenderung untuk melahirkan ketimpangan.

Berbagai penelitian yang pernah dilakukan membuktikan bahwa tidak dapat disimpulkan adanya *trade off* antara pertumbuhan dan ketimpangan (Kuncoro, M. 1997)

RUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah pokok penelitian adalah: "Bagaimana pemetaan perkembangan ekonomi antar daerah di Indonesia?".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik berupa perkembangan PDRB masing-masing provinsi dan kawasan di Indonesia dalam kurun waktu 2014 – 2018. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif atau tabulasi untuk dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan ekonomi regional dilihat dari berbagai indikator variabel ekonomi makro atau bahkan variabel pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan tingkat ketimpangan pembangunan yang diukur dengan indeks Gini Ratio atau Indeks Williamson, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini hanya menentukan pertumbuhan ekonomi atau besarnya nilai PDRB masing-masing daerah atau kawasan yang digunakan. Pertumbuhan ekonomi dapat dianggap sebagai cerminan dari kapasitas dan kemampuan ekonomi suatu daerah dan merupakan sebuah proses secara berkelanjutan dalam mengelola berbagai sumber daya pembangunan yang tersedia baik, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal bahkan penggunaan teknologi.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada periode 2014 sampai 2018 masih didominasi oleh kelompok propinsi di Kawasan Barat Indonesia dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto. Pada tahun 2014 Pulau Sumatera memiliki kontribusi sebesar 23,03 persen, Pulau Jawa sebesar 57,39 persen, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,87 persen Pulau Kalimantan sebesar 8,77 persen, Pulau Sulawesi sebesar 5,46 persen dan sisanya 2,31 persen dari Maluku dan Papua. Sehingga secara keseluruhan Kawasan Barat Indonesia (Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan) memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 89,18 persen sedangkan Kawasan Timur Indonesia hanya sebesar 10,82 persen.

Kontribusi masing-masing pulau adalah Pulau Sumatera 23,02 persen Pulau Jawa sebesar 57,39 persen, kemudian Pulau Kalimantan 8,77 persen, Pulau Sulawesi 5,64 persen dan Nusa Tenggara dan Balu sebesar 2,87 persen, Maluku dan Papua 2,31 persen.

Untuk Pulau Sumatera, maka tiga Provinsi yang memiliki kontribusi terbesar adalah Provinsi Riau sebesar 6,36 persen, Sumatera Utara sebesar 4,89 persen dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,87 persen sedangkan yang terkecil adalah Provinsi Bengkulu sebesar 0,42 persen. Hal ini dapat menjelaskan bahwa untuk daerah Pulau Sumatera terjadi ukuran perekonomian regional

yang tidak proporsional atau terjadi ketimpangan pembangunan. Perbedaan antara Provinsi yang tertinggi dengan yang terendah adalah sebesar 5,94 poin.

Pulau Jawa Provinsi yang memiliki kontribusi terbesar adalah DKI Jakarta sebesar 16,50 persen dan yang terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,87 persen. Terjadi perbedaan sebesar 15,63 poin. Ketimpangan pembangunan antara DKI Jakarta dengan DI Yogyakarta sangatlah signifikan. Pulau Kalimantan, maka Provinsi Kalimantan Timur memiliki kontribusi yang terbesar yaitu 4,94 persen dan terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,55 persen. Terlihat bahwa ketimpangan pembangunan di Pulau ini masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 4,39 poin.

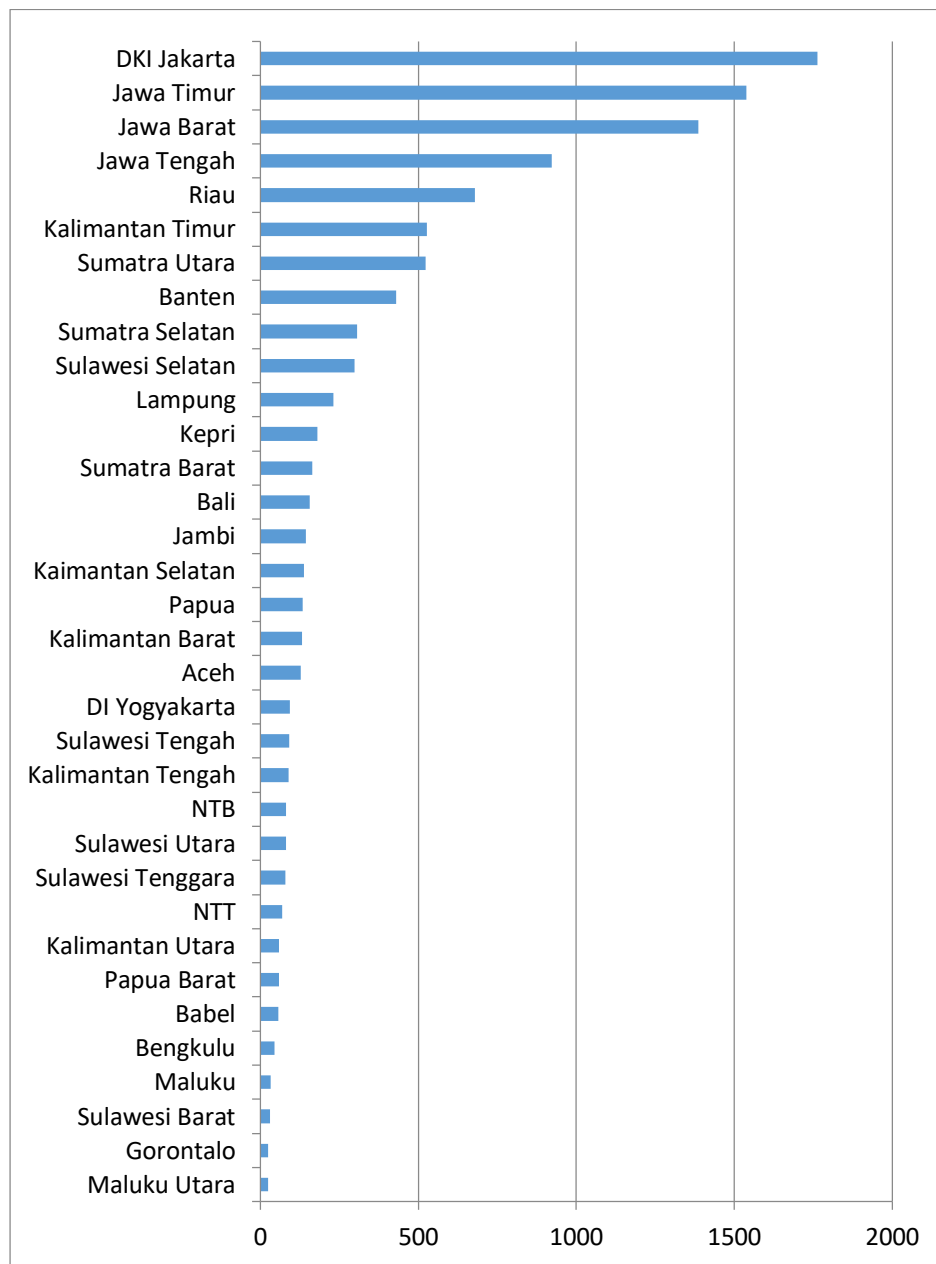
Untuk Pulau Sulawesi, maka Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan pertama yaitu sebesar 2,79 persen dan terendah Provinsi Gorontalo sebesar 0,24 persen. Terjadi selisih sebesar 2,55 poin. Sedangkan di kawasan Bali dan Nusa Tenggara, maka Provinsi Bali memiliki kontribusi sebesar 1,46 persen dan terendah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,64 persen. Terjadi perbedaan sebesar 0,82 poin. Dan Kawasan Maluku dan Papua, maka Provinsi Papua memiliki kontribusi terbesar yaitu 1,25 persen dan terkecil Provinsi Maluku Utara sebesar 0,23 persen. Selisihnya hanya sebesar 1,02 poin.

Secara keseluruhan, tiga Provinsi yang memiliki kontribusi terbesar adalah masing-masing Provinsi DKI Jakarta memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDB yaitu sebesar 16,50 persen, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat masing-masing sebesar 14,40 persen dan 12,97 persen sedangkan yang terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 0,23 persen, Provinsi Gorontalo sebesar 0,24 persen dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,28 persen. Atau terdapat selisih antara yang tertinggi dengan yang terendah sebesar 16,27 poin.

Hal ini dapat difahami mengingat DKI Jakarta merupakan pusat ibu kota yang sekaligus menjadi pusat pendidikan, perdagangan dan jasa lainnya. Daerah ini sektor yang dominan adalah sektor kategori G yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Motor yang memiliki kontribusi terhadap PDRB DKI Jakarta sebesar 17,28 persen. Sedangkan Provinsi Maluku Utara sektor yang dominan adalah Lapangan Usaha kategori A yaitu Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa secara sektoral Lapangan Usaha Jasa lebih memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan perekonomian daerah dibandingkan dengan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Secara ilustratif, peringkat

masing-masing daerah provinsi berdasarkan nilai PDRB pada tahun 2014 terlihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar (1) Peringkat Provinsi Berdasarkan Nilai PDRB Tahun 2014

Selama periode 2014 – 2018 besaran kontribusi pulau-pulau dan daerah tersebut tidak mengalami perubahan yang drastis. Pada tahun 2018. Untuk Pulau Sumatera mengalami sedikit perubahan besarnya kontribusi namun tetap dengan urutan peringkat yang sama yaitu Provinsi Riau sebesar 5,04 persen atau turun sebesar 1,32 poin. Daerah ini terjadi perubahan kontribusi yang drastis. Sumatera Utara naik menjadi sebesar 4,95 persen atau 0,06 poin, dan Provinsi Sumatera Selatan turun menjadi sebesar 2,80 persen atau turun sebesar 0,07 poin sedangkan yang terkecil adalah Provinsi Bengkulu sebesar 0,44 persen, namun naik sebesar 0,02 poin. Hal ini dapat menjelaskan bahwa untuk daerah Pulau Sumatera tidak mengalami pergeseran kontribusi secara signifikan. Perbedaan antara Provinsi yang tertinggi dengan yang terendah adalah sebesar 5,94 poin.

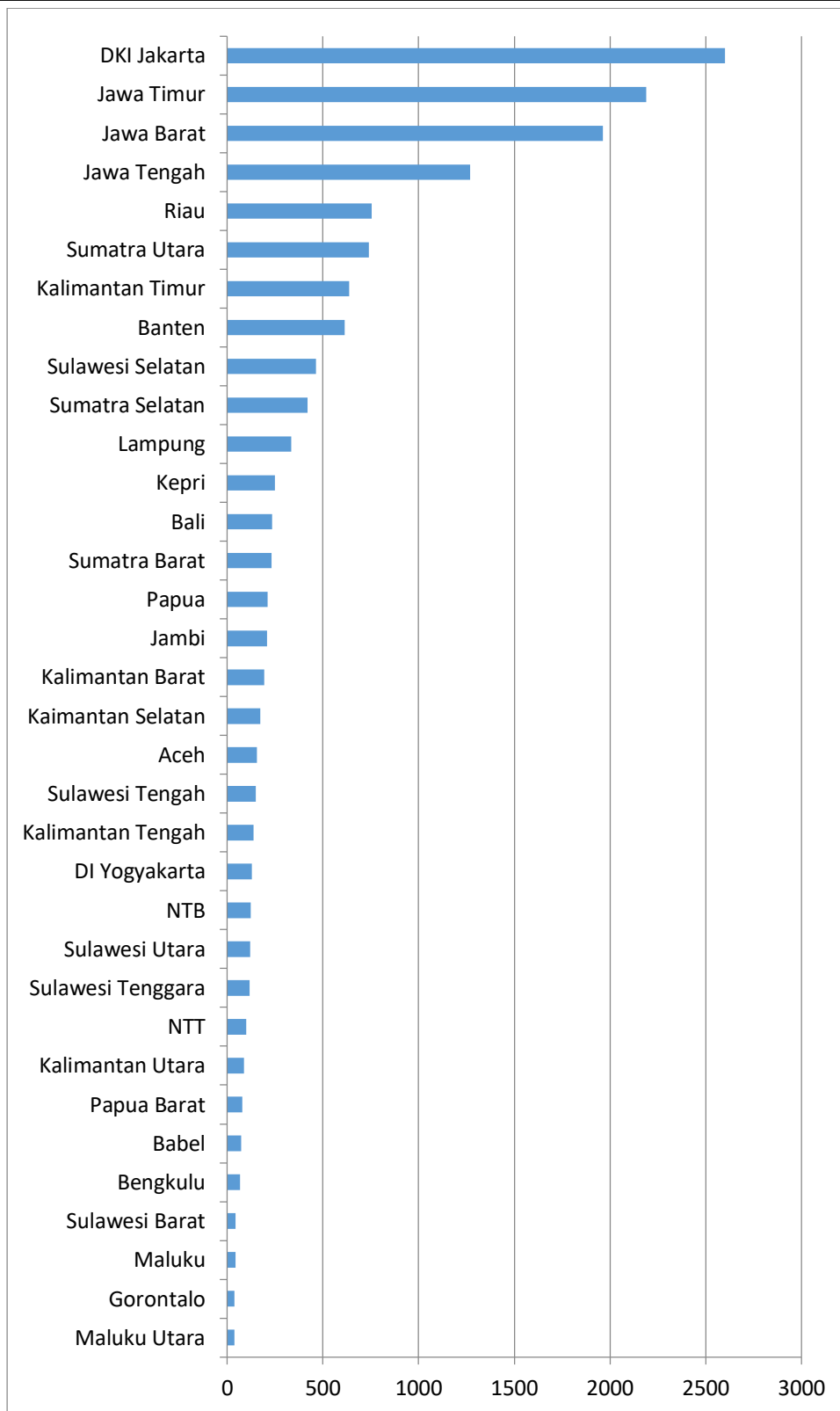
Pulau Jawa Provinsi yang memiliki kontribusi terbesar adalah DKI Jakarta sebesar 17,34 persen naik sebesar 0,84 poin dan yang terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta tetap sebesar 0,87 persen. Terjadi perbedaan sebesar 16,47 poin. Terjadi kenaikan ketimpangan pembangunan antara DKI Jakarta dengan DI Yogyakarta. Pulau Kalimantan, maka Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki kontribusi terbesar yaitu 4,26 persen terjadi kenaikan 0,69 poin dan terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,57 persen naik sebesar 0,02 poin. Terlihat bahwa ketimpangan pembangunan di Pulau ini masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 3,89 poin mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 0,50 poin.

Untuk Pulau Sulawesi, maka Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan pertama yaitu sebesar 3,09 persen mengalami peningkatan sebesar 0,3 poin dan terendah masih tetap Provinsi Gorontalo sebesar 0,25 persen naik 0,01 poin. Terjadi selisih sebesar 2,85 poin mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Sedangkan di kawasan Bali dan Nusa Tenggara, maka Provinsi Bali memiliki kontribusi sebesar 1,56 persen naik 0,1 poin dan terendah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,66 persen naik sebesar 0,02 poin. Terjadi perbedaan sebesar 0,90 poin. Dan Kawasan Maluku dan Papua, maka Provinsi Papua memiliki kontribusi terbesar yaitu 1,41 persen, naik sebesar 0,16 poin dan terkecil Provinsi Maluku Utara sebesar 0,24 persen naik 0,01 poin. Selisihnya hanya sebesar 1,17 poin, terjadi kenaikan sebesar 0,05 poin.

Secara keseluruhan, tiga Provinsi yang memiliki kontribusi terbesar adalah masing-masing Provinsi DKI Jakarta sebesar 17,34 persen mengalami peningkatan sebesar 0,84 poin, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat masing-masing sebesar 14,61 persen dan 13,09

persen sedangkan yang terkecil adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 0,24 persen, Provinsi Gorontalo sebesar 0,25 persen dan Provinsi Sulawesi Barat dan Maluku sebesar 0,29 persen. Atau terdapat selisih antara yang tertinggi dengan yang terendah sebesar 17,1 poin. Dan kondisi ini juga terjadi selama tahun 2014 – 2018, kecuali Provinsi Maluku pada tahun 2014 berada pada urutan terbawah keempat, namun pada tahun 2018 turun setingkat dengan Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini menggambarkan bahwa percepatan pembangunan masih terjadi di Pulau Jawa dibandingkan dengan daerah di luar Pulau Jawa.

Sehingga secara keseluruhan Kawasan Barat Indonesia masih dominan dalam kontribusinya terhadap PDB yaitu sebesar 88,27 persen walaupun terjadi penurunan dari tahun 2014 sebesar 0,91 poin dan Kawasan Timur Indonesia sebesar 11,73 persen dan mengalami peningkatan sebesar 0,91 poin. Dapat menjadi indikasi bahwa skala dan aktifitas ekonomi antara wilayah Kawasan Barat Indonesia masih lebih besar dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia. Secara ilustratif, peringkat masing-masing daerah provinsi berdasarkan nilai PDRB pada tahun 2018 terlihat pada gambar 2 di bawah ini.



Gambar (2) Peringkat Provinsi Berdasarkan Nilai PDRB Tahun 2018

Secara keseluruhan selama periode 2014 – 2018 terdapat daerah yang memiliki kontribusi PDRB terhadap PDB nasional yang *meningkat* setiap tahun seperti Sumatera Utara (kecuali pada tahun 2018), Sumatera Barat (kecuali pada tahun 2018), Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua. Daerah yang kontribusinya *berfluktuasi* seperti; Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Barat. Sedangkan yang mengalami *penurunan* adalah Provinsi Aceh, Riau, Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Selatan. Kontribusi yang stabil adalah D.I Yogyakarta, Maluku (kecuali pada tahun 2014 lebih besar dari tahun-tahun sesudahnya), Maluku Utara (kecuali tahun 2018 naik dari tahun-tahun sebelumnya)

Yang menarik dari gambaran di atas adalah daerah yang berada dalam kawasan Pulau Sulawesi mengalami kontribusi yang meningkat termasuk dua daerah hasil pemekaran yaitu Sulawesi Barat, Gorontalo. Dapat dikatakan bahwa pada kawasan Pulau Sulawesi pada periode ini sudah memiliki kegiatan yang semakin intensif. Kerja sama kawasan Pulau Sulawesi bisa menjadi salah satu penyebabnya. Sedangkan Kalimantan Timur yang dikenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah justru kontribusinya fluktuatif. Provinsi Aceh yang sudah berada pada tahap pemulihan setelah bencana tsunami justru mengalami kontribusi yang menurun.

Perbedaan perkembangan ekonomi antar daerah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Alokasi investasi baik PMA ataupun PMDN. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa investasi yang rendah menyebabkan kurangnya kegiatan ekonomi produktif.
2. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah.
3. Perbedaan persediaan SDA antar daerah.
4. Perbedaan kondisi demografis.
5. Kurang lancarnya perdagangan antar pulau.

KESIMPULAN

Hasil analisis tabulasi menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia dilihat dari perkembangan PDRB masing-masing daerah, maka masih terlihat

dominasi daerah yang berada di kawasan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Hal ini dapat mengindikasikan kalau perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di kedua kawasan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Boediono, 1982, *Teori Pertumbuhan Ekonomi; Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4*, BPFE- UGM, Yogyakarta.
- Dombusch. R, dkk, 2004, *Makroekonomi*, (terjemahan Yusuf Wibisono) Edisi Bahasa Indonesia, Media Globat Edukasi, Jakarta.
- Jhingan M.I., 1975, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (terjemahan D. Guritno), Penerbit CV. Radjawali, Jakarta.
- Kuncoro, M. 1997, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Penerbit, UPP-AMP-YKPN, Yogyakarta.
- Soelistyo, 2003, *Pengantar Ekonomi Makro*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Tietenberg, T., 1988, *Environmental Natural Resource Economics*, Second Edition, Scott, Foresman, London.